

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Nahdlatul Ulama (NU) adalah sebuah organisasi politik dan keagamaan yang sangat menarik untuk diteliti. Nahdlatul Ulama yang didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926<sup>1</sup> adalah ormas Islam terbesar di tanah air yang sepertinya tidak pernah tuntas untuk diamati dan diteliti. NU adalah sebuah organisasi yang dikontrol oleh para ulama yang memiliki massa pengikut riil. Keberadaan organisasi yang didirikan oleh para ulama ini sangatlah diperhitungkan dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari sejarah perjalanan panjang yang mengiringi perjalanan bangsa Indonesia, menjadikan organisasi ini mempunyai kekuatan untuk memberikan perubahan bagi perkembangan Islam di Indonesia.

Sejak awal berdirinya, Nahdlatul Ulama berlandaskan Aswaja atau *Ahlussunah wal Jama'ah*. Pada awal berdirinya Nahdlatul Ulama adalah organisasi keagamaan yang fungsi utamanya adalah sebagai wadah perjuangan para ulama serta para pengikutnya dengan tujuan pokok memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam. Sebagai organisasi kemasyarakatan, NU menjadi tak terpisahkan dari keseluruhan bangsa Indonesia

---

<sup>1</sup>Dhurorudin Mash'ad, *Akar Konflik Politik Islam Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), 108.

serta senantiasa menyatu dengan perjuangan nasional.<sup>2</sup> Tujuan awal berdirinya NU ini nampaknya bergeser dengan masuknya NU ke dalam politik praktis. Hal ini dimulai setelah NU masuk kedalam Masjumi dan keluar dari keanggotaan dalam partai tahun 1952, setelah itu NU menjadi partai politik dan mengikiti pemilihan umum tahun 1955. Perjalanan politik NU tidak berhenti sampai disitu, NU kemudian bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Januari 1973 yang taklepas dari desakan pemerintahan Orde Baru yang dikenal otoriter.

Pada awal pendiriannya, NU tidak terlibat dalam politik praktis, walaupun peran politiknya sangat terasa dalam kancah perpolitikandi Indonesia. Namun sejak keluar dari Masyumi tahun 1952 hingga 1984, NU terlibat langsung dalam politik praktis. Pada periode tersebut visi dan misi NU berubah orientasi, dari organisasi keagamaan (*Jam'iyah Diniyah*) menjadi organisasi Politik. Berubahnya paradigma ini diikuti juga oleh perubahan arah orientasi yang ingin dicapai oleh NU atau lebih tepatnya oleh para elit politik yang berkuasa di NU. Hal yang tidak bisa dielakkan adalah bahwa urusan keumatan yang menjadi misi utama NU semakin terabaikan.<sup>3</sup>

Akibat terlalu sibuk terjun dalam hingar bingar politik nasional, lembaga-lembaga badan otonom NU yang menjadi tanggung Jawab NU tidak dapat berkembang lagi, bahkan ada diantaranya yang tidak terurus. Hal ini adalah sebuah keniscayaan karena bagaimanapun NU menjadi salah satu ormas Islam yang mempunyai massa riil dan kongkrit yang hal ini dibuktikan pada pemilu pertama

---

<sup>2</sup>Abdul Muchith Muzadi, *Mengenal Nahdlatul Ulama* (Surabaya: Khalista, 2006), 20.

<sup>3</sup>Titik Triwulan Tutik dkk, *Membaca Peta Politik Nu Sketsa Poloitik Kiai & Perlawanan Kaum Muda NU* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008), 43.

1955 NU menjadi pemenang yang ketiga dari *the big four* setelah PNI dan Masyumi.<sup>4</sup>

Pada tahun 1973, Orde Baru mengeluarkan kebijakan difusi partai-partai Islam dengan meleburkan ke dalam satu partai, Partai Persatuan Pembangunan (PPP)<sup>5</sup>. Fusi ini dalam hal tertentu memiliki arti, bergesernya medan konflik dari konflik yang berlangsung diluar partai (antar-partai) ke konflik internal (ditubuh partai). Pada saat inilah, pemerintah mengenalkan konsep “massa mengambang”, yang bagi kelompok-kelompok Islam berarti menjauhkan afiliasi masyarakat kepada Islam politik.<sup>6</sup>

Penyatuan ini kemudian menimbulkan konflik internal di tubuh PPP, antara faksi NU dan fraksi Muslimin Indonesia (MI) sulit untuk dielakkan karena *power sharing* yang dilakukan kurang memuaskan kalangan NU yang memiliki massa yang paling banyak. Hal ini terbukti dari perolehan suara PPP pada pemilu 1977 meskipun meningkat dari 27,11 % menjadi 29,29 % (bertambah 5 kursi di DPR) namun tidak menguntungkan NU, karena 2 kursi di DPR yang menjadi jatah NU

---

<sup>4</sup> Titik Triwulan Tutik dkk, *Membaca Peta Politik Nu Sketsa Poloitik Kiai & Perlawanan Kaum Muda NU*, 44.

<sup>5</sup>Fusi atau penyederhanaan partai ini dimaksudkan sebagai bentuk dukungan terhadap program-program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah orde baru. Gagasan fusi partai yang dilakukan pada tahun 1973 secara formal juga dimaksudkan untuk lebih menyederhanakan sistem perpolitikan di Indonesia dengan tetap mempertahankan aliran-aliran yang hidup dalam masyarakat (Titik Triwulan Tutik dkk, *Membaca Peta Politik Nu Sketsa Poloitik Kiai & Perlawanan Kaum Muda NU*, 45)

<sup>6</sup> Yudi Latif, *Intelegensia Muslim Dan Kuasa Geneologi Intelegensia Muslim Indonesia Abad Ke-20* (Bandung: Mizan, 2005), 484.

diberikan kepada golongan Islam lainnya. Hal ini terus berlanjut, ketika daftar calon untuk pemilu tahun 1982 diajukan posisi NU kembali dirugikan.<sup>7</sup>

Konflik ini yang menyebabkan NU keluar dari hinggar bingar politik nasional dan kemudian menyatakan diri kembali ke NU 1926 atau yang lebih dikenal dengan istilah Khittah NU 1926. Tidak hanya itu, NU juga menerima Pancasila sebagai asas tunggal yang disahkan pada Muktamar ke 27 tahun 1984 di Situbondo Jawa Timur. Kembali ke Khittah berarti NU secara institusi tidak terikat dengan partai politik atau organisasi masyarakat lain. Dalam hal ini, Abdurahman Wahid, dikenal sebagai salah satu tokoh dan konseptor dari Khittah 1926 bersama Ahmad Siddiq dan Tim Tujuh tersebut.

Menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai peran dari Abdurahman Wahid dalam upaya NU untuk kembali pada jatidiri NU 1926 karena beliau adalah cucu K.H Hasyim Asy'ari, selaku pendiri pesantren Tebuireng di Jombang serta pendiri dari organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Ayah Abdurrahman Wahid sendiri, Wahid Hasyim, pernah menjadi ketua PBNU, pernah menjabat sebagai kepala Jawatan Agama Pusat (*Shumubanco*) di masa Jepang, pernah menjadi anggota BPUPKI (Badan Penyelenggara Untuk Persiapan Kemerdekaan Indonesia), BPKI (Badan Penyelenggara Kemerdekaan Indonesia), dan BPKNIP (Badan Pekerja Komite Nasioal Indonesia Pusat).<sup>8</sup> Setelah Indonesia merdeka beliau menjadi Menteri

---

<sup>7</sup> Titik Triwulan Tutik dkk, *Membaca Peta Politik Nu Sketsa Poloitik Kiai & Perlawanan Kaum Muda NU*, 49.

<sup>8</sup> Muhammad Rifai, *Wahid Hasyim Biografi Singkat 1914-1953* (Yogyakarta: Garasi, 2009), 40.

Agama pertama setelah Indonesia merdeka. pada tahun 1952, setelah bertahan menjadi Menteri Agama selama lima kabinet, Wahid Hasyim kehilangan jabatan itu dalam salah satu pergantian menteri yang sering terjadi dalam periodenya ini.

Abdurrahman Wahid sendiri adalah seorang sosok yang penuh kontroversi, unik, dan mempunyai karisma tersendiri dalam organisasi NU karena beliau adalah keturunan dari tokoh yang paling terkemuka pada organisasi ini.<sup>9</sup> Oleh karena hal tersebut maka Laode Ida dalam bukunya yang berjudul “*NU Muda, Kaum Progresif dan Sekularisme Baru*” menganggap Gus Dur mempunyai faktor pengaruh penting berdasarkan nilai-nilai tradisionalisme, karena ia adalah darah biru NU.<sup>10</sup>

Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita kenal dengan Gus Dur memimpin NU dalam kurun waktu yang lama, yakni selama tiga periode dari tahun 1984-1999. Secara formal, aktivitas Abdurrahman Wahid dalam organisasi NU dimulai pada tahun 1979 pada Muktamar NU di Semarang, yang kemudian ditunjuk sebagai wakil Katib Syariah PBNU. Gus Dur bahkan mulai menampakkan peranannya dalam Munas dan Muktamar NU ke-27 di Situbondo yang menghasilkan keputusan yang sangat penting dalam perjalanan NU. Pada saat itulah Gus Dur semakin dalam

---

<sup>9</sup> Banyak hal kontroversial yang dilakukan Abdurrahman Wahid, salah satunya adalah mengganti kata assalamualaikum dengan selamat pagi, selamat siang atau selamat malam. Selain itu ia juga menjadi juri dalam festival film Indonesia (FFI) yang membeberkan kemiskinan umat Islam serta membuka lomba lagu-lagu Gerejani. Ia juga dikenal sebagai kiai, budayawan, sekaligus juga negarawan yang populer dikalangan NU, Indonesia, dan di dunia internasional. Dengan gayangnya yang khas ia mampu berkiprah di ranah perpolitikan nasional dan kemudian berhasil dipilih menjadi presiden RI yang ke 4.

<sup>10</sup>Laode Ida, *NU Muda Kaum Progresif dan Sekularisme Baru* (Jakarta: Erlangga, 2004), 173.

berkecimpung dalam organisasi NU yang lebih memilih keluar dari perpolitikan serta mengakui Pancasila sebagai asas tunggal.

Keluarnya NU dari politik praktis serta pengakuan terhadap Pancasila ditandai dari diambilnya keputusan pada Mukhtamar NU yang ke-27 tahun 1984. Mukhtamar Nahdlatul Ulama yang ke-27 pada tahun 1984 ini berlangsung di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Asembagus, Situbondo, Jawa Timur. Mukhtamar ini berlangsung antara tanggal 8-12 Desember setelah sebelumnya sukses diadakan Munas Nahdlatul Ulama ditempat yang sama pada tahun 1983. Sukses Munas tersebut meratakan jalan menuju suksesnya Mukhtamar NU 1984 karena Munas ini merupakan sarana musyawarah antar ulama NU dan bertujuan untuk mengumpulkan gagasan-gagasan yang akan diajukan ke Mukhtamar. Akan tetapi Munas tidak mempunyai otoritas untuk mengubah anggaran dasar, mengubah NU, keputusan Mukhtamar, ataupun komposisi kepengurusan pusat. Akan tetapi, bagaimanapun juga Munas sendiri mempunyai kekuatan moral tersendiri.<sup>11</sup>

Pada Munas ini juga menandai munculnya kepemimpinan Achmad Shidiq<sup>12</sup> dan Abdurrahman Wahid.<sup>13</sup> Achmad Siddiq terpilih sebagai ketua Dewan Syariah dan juga Abdurrahman Wahid terpilih menjadi ketua Dewan Tanfidziah. Serta

---

<sup>11</sup> Greg Fealy dkk, *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara* (Yogyakarta: Lkis, 2010), 126.

<sup>12</sup> KH. Achmad Siddiq merupakan generasi kedua pendiri NU. Ayahnya, KH. M. Siddiq adalah pendiri pesantren asy-Siddiqiyah, Jember. Pada 1951, adalah salah seorang pendiri NU. Setelah memimpin organisasi kepemudaan NU-ansor-ia menjadi sekretaris menteri agama Wahid Hasyim pada 1945-1952. Ia terpilih sebagai anggota DPR hasil pemilu 1955, namun segera mengundurkan diri untuk berkonsentrasi pada pendidikan pesantren. Ia menjabat sebagai anggota syariah ketika menulis brosurnya yang berpengaruh "Khittah Nahdhiniyah" dia akhir tahun 1970-an, dan dianggap memainkan peran penting dalam merumuskan identitas NU.

<sup>13</sup> Greg Fealy dkk, *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*, 132.

melalui Munas ini, kiprah Achmad Shidiq dan Abdurrahman Wahid diakui secara luas dan semakin memantapkan posisi kepemimpinan mereka pada Mukhtamar NU 1984.

Dipilihnya Situbondo sebagai lokasi Mukhtamar juga mengandung arti yang sangat penting. Berbeda dengan lokasi Mukhtamar sebelumnya yang diadakan di kota besar, seperti Surabaya dan Semarang yang merupakan ibu kota dari propinsi Jawa Timur dan Jawa tengah. Situbondo adalah daerah terpencil di Jawa Timur, bahkan lebih tipikal sebagai daerah pesantren. Dipilihnya tempat ini selain untuk memberi penghargaan kepada KH. As'ad Syamsul Arifin, sebagai tokoh senior NU, sekaligus juga mengekspresikan suatu hubungan yang lebih besar, berkaitan dengan tema Mukhtamar “pemantapan kembali kepemimpinan Ulama” di dalam NU.<sup>14</sup>

Seperti yang sudah penulis paparkan diatas bahwa Abdurrahman Wahid merupakan salah satu pioner serta seorang konseptor dalam kembalinya NU ke *Khittah* NU 1926 yang disahkan pada Mukhtamar NU di Situbondo. Mukhtamar NU yang ke 27 di Situbondo tahun 1984 adalah periode yang penting dalam sejarah NU, setelah merasa bahwa ia terlalu jauh meninggalkan garis tujuan awal perjuangannya kemudian kembali lagi kepada tujuan awal berdirinya. Dengan kembali menjadi organisasi keagamaan, NU telah menjawab kegelisahan yang dirasakan oleh warga NU yang resah dengan kenyataan bahwa NU semakin larut berkecimpung dalam permainan politik. Keputusan ini (yang kemudian dikenal dengan keputusan

---

<sup>14</sup> Ibid., 133.

Situbondo) menunjukkan langkah penting dalam mengembalikan jatidiri NU sebenarnya.

Dalam proses pengambilan keputusan kembali ke Khittah 1926 serta penetapan Pancasila sebagai asas organisasi pastinya tidak mudah untuk mencapai kesepakatan itu. Meskipun sebenarnya ide untuk mengembalikan NU pada jalur Khittah 1926 telah berdentung jauh sebelum itu, untuk merealisasikannya tidaklah semudah membalikkan tangan. Negosiasi-negosiasi serta diskusi-diskusi dalam menuju kesepakatan itu harus dilakukan agar tidak timbul suatu konflik baru antar jamiyyah NU atau antar ulama. Seperti yang sebelumnya disebutkan bahwa pada awal 1980-an didalam tubuh NU sedang mengalami konflik internal yang juga perlu diselesaikan sebelum mengubah arah tujuan perjuangan Nahdlatul Ulama. Selain itu, tekanan dari pihak Orde Baru untuk penerapan Pancasila sebagai asas tunggal semua organisasi juga harus mendapatkan perhatian lebih untuk kelangsungan organisasi yang sedang sakit ini.

Negosiasi-negosiasi yang pelik dibalik layar, antara fraksi-fraksi didalam tubuh NU dan juga dengan pemerintah, diperlukan untuk sampai kepada keputusan untuk kembali ke Khittah NU 1926 serta mengakui Pancasila sebagai asas tunggal. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa kedua keputusan itu diambil dalam munas alim ulama situbondo 1983 dan kemudian di sahkan dalam Muktamar setahun berikutnya. Keberhasilan untuk membawa NU kepada garis awal perjuangan serta menetapkan Pancasila sebagai asas organisasi adalah sebuah prestasi luar biasa yang dilakukan NU. Dalam hal ini yang menjadi pertanyaan

adalah bagaimana cara NU dan siapa saja yang berperan dalam mengembalikan arah tujuan tersebut. Padahal NU sendiri adalah sebuah organisasi yang sangat menjunjung tinggi keberadaan para ulama. Selain itu, setelah diambilnya keputusan tersebut pastilah terjadi gejolak politik dalam tubuh NU baik internal maupun eksternal yang terjadi.

Oleh karena hal itu penulis perlu mengungkapkan dimana posisi serta pengaruh ulama dan Abdurrahman Wahid dalam proses kembalinya NU pada garis awal perjuangan serta gejolak apa saja yang terjadi setelah NU kembali ke Khittah 1926 sampai pemilu 1987. Hal yang menarik lainnya untuk dikaji adalah dalam proses pengambilan keputusan Muktamar tersebut adalah siapa yang memainkan peran-peran penting tersebut, serta sejauh mana peran yang dilakukan Abdurrahman Wahid dalam negosiasi yang terjadi selama menuju dan pada pengambilan keputusan penting Muktamar Situbondo. Seperti yang telah penulis kemukakan diatas, maka penulis melakukan sebuah studi tentang perjalanan NU, terutama mengungkapkan peran Abdurrahman Wahid dalam Muktamar NU ke-27 di Situbondo tahun 1984, serta mengungkapkan gejolak apa saja yang terjadi pada tubuh NU setelah kembalinya ke Khittah 1926 sampai pemilu 1987.

## **B. Rumusan Masalah**

Penulisan ini bertujuan untuk mengungkap peran dari Abdurrahman Wahid dalam Muktamar NU ke-27 di Situbondo Jawa Timur tahun 1984, merekonstruksikan hasil-hasil dari Muktamar, serta mengungkapkan gejolak apa

yang terjadi pada tubuh NU setelah kembalinya ke Khittah 1926 sampai pemilu 1987. Adapun rumusan masalah pada pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa perlu diadakan Muktamar NU dan Apa hasil-hasil dari Muktamar NU ke-27 tahun 1984 di Situbondo?
2. Bagaimana peran Abdurrahman Wahid dalam Muktamar NU ke-27 tahun 1984 di Situbondo?
3. Apa yang dimaksud Khittah NU 1926 itu? Dan gejala apa yang terjadi setelah kembalinya ke Khittah 1926 sampai pemilu 1987?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian yang berjudul “peran dari Abdurrahman Wahid dalam Muktamar NU ke-27 tahun 1984 di Situbondo” ini adalah:

1. Mengetahui hasil dari Muktamar NU ke-27 tahun 1984 di Situbondo serta tujuan dari diadakannya Muktamar tersebut.
2. Mengetahui peran Abdurrahman Wahid dalam Muktamar NU ke-27 tahun 1984 di Situbondo.
3. Mengetahui apa yang dimaksud Khittah NU 1926 itu serta mengetahui gejala politik warga NU yang terjadi setelah kembalinya ke Khittah 1926 sampai pemilu 1987.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Banyak tulisan-tulisan yang membahas mengenai Abdurrahman Wahid. Akan tetapi, penulisan mengenai peran Abdurrahman Wahid dalam Muktamar NU yang ke-27 di Situbondo tahun 1984 sangat minim. Dengan dilakukannya penulisan ini diharapkan akan bermanfaat, diantaranya:

1. Bagi penulis, merupakan sarana untuk mengetahui lebih jauh mengenai peran Abdurrahman Wahid dalam mengembalikan NU pada Khittah 1926 yang disahkan dalam Muktamar yang ke-27 di Situbondo tahun 1984 serta gejolak-gejolak yang terjadi sebelum dan pasca diambilnya keputusan dalam Muktamar tersebut.
2. Bagi akademisi, ikut serta menambah khasanah keilmuan dalam bidang sejarah Islam Indonesia dalam bentuk karya ilmiah, khususnya di Fakultas ADAB.
3. Bagi Masyarakat, yakni dapat mengetahui peran Abdurrahman Wahid dalam mengembalikan NU pada Khittah 1926 Muktamar yang ke-27 di Situbondo serta mengetahui hasil dari Muktamar tersebut serta gejolak-gejolak yang terjadi pada warga NU sebelum dan pasca diambilnya keputusan dalam Muktamar tersebut, sehingga masyarakat dapat mengambil manfaat dan pelajaran dari peristiwa sejarah tersebut.

## **E. Pendekatan Dan Kerangka Teoritik**

Penulisan ini menggunakan pendekatan historis dan sosiologis. Pendekatan historis digunakan untuk menggambarkan sejarah yang berkaitan dengan Abdurrahman Wahid serta Mukhtar NU yang ke-27 di Situbondo tahun 1984 secara jujur dan objektif. Pendekatan sosiologis digunakan untuk menggambarkan interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan, antara individu maupun golongan yang akan menimbulkan suatu dinamika kehidupan. Kedinamikaan dan perubahan sosial akan bermuara pada terjadinya mobilitas sosial.

Dengan kedua pendekatan ini akan mengungkapkan pengaruh-pengaruh Gus Dur yang menjadi faktor yang mengakibatkan perubahan orientasi berorganisasi dalam tubuh NU. Dalam hal ini pendekatan sosiologis digunakan untuk menggambarkan kondisi interaksi sosial baik konflik berdasarkan kepentingan, peranan dan sebagainya yang terjadi menuju pengambilan keputusan dalam Mukhtar NU ke-27 yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid. Hal ini khususnya interaksi yang dilakukan Abdurrahman Wahid yang bisa mempengaruhi dinamika dan perubahan sosial yang bermuara pada terjadinya suatu kesepakatan dan mobilitas sosial dalam tubuh Nahdlatul Ulama .

Selain itu, Memahami peran Abdurrahman Wahid dalam mengembalikan jati diri NU ke Khittah 1926 tidak lepas dari teori karisma. Seperti yang

diungkapkan Marx Weber, karisma<sup>15</sup> adalah kekuatan revolusioner, salah satu kekuatan revolusioner penting di dunia sosial. Kalau otoritas tradisional jelas sangat konservatif (bersikap mempertahankan keadaan, kebiasaan, dan tradisi yang berlaku), maka lahirnya pemimpin yang karismatik sangat mungkin menjadi ancaman bagi sistem tersebut dan membawa pada perubahan dramatis dalam sistem.

Yang membedakan karisma sebagai kekuatan revolusioner adalah bahwa dia menyebabkan berubahnya pikiran aktor, hal ini menyebabkan “reorientasi subjektif atau internal”. Perubahan perubahan tersebut bisa mengarah pada “perubahan sikap utama dan arah tindakan secara radikal menjadi orientasi yang sama sekali baru bagi semua sikap terhadap perbedaan masalah dunia sosial.<sup>16</sup> Pengaruh kreatif para pemimpin individual yang memiliki dirinya sendiri dalam bentuk murni tidak sesuai dengan struktur-struktur sosial yang mapan, tetapi setiap pemimpin karismatis pada akhirnya memerlukan serombongan pengikut atau murid.<sup>17</sup>

Dalam memahami peran Abdurrahman Wahid dalam Mukhtamar NU 1984 yang merupakan langkah revolusioner NU dalam berpolitik dan terhadap Pancasila maka tidak lepas dari teori Marx Weber bahwa lahirnya pemimpin karismatik (Gus Dur) sangat mungkin menjadi ancaman bagi sistem yang sedang berjalan pada tubuh NU yang pada saat itu terlalu masuk kedalam politik praktis dan hadirnya Gus

---

<sup>15</sup> Dalam kamus ilmiah populer, karisma diartikan sebagai: wibawa, kewibawaan, karunia kelebihan dari tuhan kepada seseorang. Pius A Partanto, M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), 309.

<sup>16</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Post Modern* (Bantul: Kreasi Wacana, 2012), 145.

<sup>17</sup> Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 214.

Dur dengan membawa pada perubahan dramatis dalam sistem tersebut. Perubahan tersebut adalah membawa jamiyah NU keluar dari politik praktis dan memfokuskan diri pada tujuan awal pendirian NU yang tercermin dalam khittah 1926. Pengaruh pemimpin karismatik banyak didasarkan kepada kepemilikan kekuasaan sosial yang mana Gus Dur sendiri memiliki kekuasaan sosial secara tidak langsung selain karena kecerdasannya, ia juga merupakan cucu Rais Akbar dan anak dari tokoh penting NU.

Pendekatan dan teori yang telah disebutkan diatas digunakan penulis untuk mendeskripsikan peran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam proses menuju pengesahan keputusan kembali ke Khittah 1926 dan penerimaan Pancasila sebagai asas organisasi yang disahkan pada Muktamar NU ke-24 tahun 1984 di Situbondo. selain itu juga untuk mendeskripsikan proses menuju disepakatinya kedua keputusan penting itu, serta mendeskripsikan gejala-gejala yang terjadi setelah diambilnya keputusan dalam muktamar tersebut.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Dari hasil penelusuran yang dilakukan penulis, studi tentang NU dan Gus Dur sudah pernah dilakukan baik oleh akademisi, penulis, pemerhati, intelektual, dan ilmuan baik dalam maupun luar negeri. Adapun studi tentang NU yang pernah ditulis adalah: (1). Tulisan Ali Masykur Musa (2011) yang berjudul “ *Pemikiran dan sikap Politik Gus Dur*”, kajian ini membahas tentang: *Pertama*, mengenal Gus Dur yakni mengenalkan Gus Dur dari awal terjunnya kedalam organisasi NU,

melahirkan PKB serta saat menjadi presiden, *Kedua*, sikap politik Gus Dur dalam pengumpulan politik NU. *Ketiga*, arah pemikiran politik Gus Dur yaitu menerangkan Akar pemikiran politik Gus Dur, pemaknaan Atas ideologi Pancasila. *Keempat*, potret Gus Dur yakni menerangkan humanisme seorang Gus Dur yang pluralis, inklusif dan Egaliter.

(2) kumpulan tulisan dari Andree Feillard, Douglas E. Ramage, Daniel Dhakidae, Einar M. Sitompul, Martin van Bruinessen, Muhammad A.S. Hikam, M. Fajrul Falaakh (2010) yang diberikan judul “*Gus Dur NU dan Masyarakat Sipil*” kumpulan tulisan ini membahas tentang: *Pertama*, hubungan antara NU dan negara. *Kedua*, menerangkan tentang komitmen kebangsaan NU serta refleksi kiprah NU pasca Khittah. *Ketiga*, pemahaman Abdurrahman Wahid tentang Pancasila dan penerapannya dalam era pasca asas tunggal. *Keempat*, langkah non politik dari politik NU serta penguatan civil society di Indonesia.

(3) buku karya Einar Martahan Sitompul yang berjudul “*NU dan Pancasila*” buku ini membahas tentang penerimaan NU terhadap Pancasila sebagai asas organisasi, bentuk final negara NKRI, dan keluarnya NU dari keanggotaan partai politik (PPP), yang ditetapkan pada Mukhtamar NU ke-27 tahun 1984, di Situbondo. Suatu proses pergulatan yang kemudian dikenal dengan adagium “kembali ke Khittah 1926. Dalam buku ini juga menerangkan penerimaan NU terhadap Pancasila, penggunaan kaidah-kaidah agama (*ushul fiqh*) sebagai landasan dan sekaligus pengimplementasiannya dalam praktisi kejam’iyahan.

(4) selain itu juga terdapat penulisan terdahulu yang menyangkut topik ini yaitu “Keputusan Mukhtamar NU XXVII” yang diterbitkan oleh pengurus wilayah NU Jawa Timur. Namun buku ini hanya membahas mengenai hasil dari Mukhtamar NU yang ke-27 tahun 1984 dan juga membahas sedikit mengenai pemikiran KH. Achmad Siddiq. Sedangkan pada penulisan ini, penulis akan memfokuskan kepada peran dari Abdurrahman Wahid dalam proses mengembalikan NU pada Khittah 1926 yang disahkan dalam Mukhtamar NU yang ke-27 tahun 1984 di Situbondo Jawa Timur.

Dari semua buku yang penulis sebutkan diatas hanya menerangkan NU dan pemikiran Gus Dur secara umum saja. Sedangkan studi dan kajian mengenai NU dan Gus Dur, khususnya peran Gus Dur pada Mukhtamar NU ke-27 tahun 1984 yang menghasilkan keputusan penting untuk kembali ke Khittah dan pengakuan asas Pancasila belum pernah ada. Akan tetapi jika ada, tulisan tersebut sangat sedikit dan tidak fokus. Oleh karena itu, studi ini mengisi ruang kosong atau yang lebih tepat ruang yang masih tersedia untuk studi tentang Gus Dur dalam tubuh organisasi NU.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penulisan ilmiah, metode mempunyai peran yang sangat penting. Berdasar hal itu, penulisan ini menggunakan metode penulisan historis. Hasil rekonstruksi masa lampau berdasarkan fakta-fakta yang telah tersusun yang didapatkan dari penafsiran sejarah terhadap sumber-sumber sejarah dalam bentuk-

bentuk tertulis disebut historiografi.<sup>18</sup> Pada tahap awal penulisan ini, penulis menggunakan metode penulisan sejarah, yaitu:

### 1. Heuristik

Pada tahap ini penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber meliputi sumber tertulis berupa arsip-arsip berupa foto-foto, majalah-majalah, atau dokumen resmi Nahdlatul Ulama yang menerangkan beberapa kejadian atau peristiwa menuju pengambilan keputusan kembali ke Khittah 1926 serta penerimaan Pancasila sebagai asas organisasi, sumber-sumber tersebut dapat dianggap sebagai sumber primer. Selain itu penulis juga akan menggunakan sumber sekunder berupa buku-buku yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini. Adapun teknik yang akan penulis lakukan dalam pengumpulan sumber adalah melalui:

#### a. Sumber Primer

*Sumber Primer* adalah sumber yang dihasilkan atau ditulis oleh pihak-pihak yang secara langsung terlibat atau menjadi saksi mata dalam peristiwa sejarah<sup>19</sup>. Dalam karya ini, penulis menggunakan sumber Arsip Nahdlatul Ulama yang terletak di Museum NU maupun di ANRI Jakarta yang menerangkan Gus Dur dan proses menuju diambilnya keputusan kembali ke Khittah 1926. Selain itu data-data literatur tulisan baik artikel, jurnal, majalah, koran atau buku-buku baik di perpustakaan pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur pada khususnya

---

<sup>18</sup>Lilik Zulaicha, *Metodologi Sejarah* (Surabaya: Fakultas Adab, IAIN Sunan Ampel, 2004), 17.

<sup>19</sup>Ibid., 65.

sebagai sumber primer yang membahas mengenai Abdurrahman Wahid serta Mukhtar NU yang ke-27 digunakan dalam penulisan ini. Adapun dokumen-dokumen Nahdlatul Ulama yang menjadi sumber adalah:

1. Laporan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama pertanggal 2 Januari 1984/28 Rabiul Awwal 1404.
  2. Buku petunjuk atau Pedoman penyelenggaraan Mukhtar Nahdlatul Ulama yang ke XXVII yang diterbitkan oleh Panitia Penyelenggara Mukhtar Ke-XXVIII Nahdlatul Ulama tahun 1984.
  3. Memorandum Nomor: 11/KL/T-7/VIII/83 yang ditujukan oleh Tim Tujuh kepada Majelis 24 tanggal 7 Agustus 1983/27 Syawal 1403.
  4. Siaran Tim Tujuh Nomor: 09/KEL/VII/83 mengenai langkah menuju penyelesaian kemelut yang terjadi di dalam tubuh NU.
  5. Undangan pertemuan yang ditandatangani oleh ketua tim tujuh (Abdurrahman Wahid) untuk menghadiri diskusi pada tanggal 5 Agustus 1983 dalam rangka merumuskan konsep penataan dan pengembangan nahdlatul ulama serta menghimpun saran dalam merumuskan pola kepemimpinan NU kedepan. Surat No: 10/KL/T-7/VII/83 tanggal 28 Juli 1983/17 Syawal 1403 H.
  6. Foto-foto dalam rangka Mukhtar serta foto Abdurrahman Wahid.
- b. *Sumber sekunder* berupa buku-buku ilmiah yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Fealy, Greg dkk. *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*. Yogyakarta: Lkis, 2010.
2. Bruinessen, Martin Van. *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: Lkis, 1994.
3. Feillard, Andree. *NU Vis A Vis Negara Pencarian Isi Bentuk dan Makna*. Yogyakarta: Lkis, 1999.
4. Sitompul, Einar Martahan. *NU dan Pancasila*. Yogyakarta: Lkis, 2010.
5. Ida,Laode. *Dinamika Internal Nahdlatul Ulama Setelah Kembali ke Khittah 1926*. Tesis, Universitas Indonesia, 1995.
6. Anam, Choirul. *Jejak Langkah Sang Guru Bangsa Suka Duka Mengikuti Gus Dur Sejak 1978*. Jakarta: PT Duta Aksara Mulia, 2010.
7. Barton, Greg. *Biografi Gus Dur The Authorized Biography Of Abdurrahman Wahid*. Yogyakarta: Lkis, 2006.

## 2. Kritik

Kritik merupakan bagian yang sangat penting dalam penulisan sejarah, dari data yang terkumpul dalam tahap heuristik diuji kembali kebenarannya melalui kritik guna memperoleh keabsahan sumber. Dalam hal ini keabsahan sumber tentang keasliannya (otentisitas) yang dilakukan melalui kritik ekstern, dan keabsahan tentang kasahihannya (kreadibilitasnya) ditelusuri lewat kritik intern.<sup>20</sup> Dalam penulisan mengenai peran Abdurrahan Wahid dalam Mukhtamar NU yang ke-27 tahun 1984 di Situbondo Jawa Timur penulis menganalisa secara mendalam terhadap sumber-sumber yang telah diperoleh baik primer ataupun sekunder melalui kritik intern dan eksteren untuk mendapatkan keaslian dan

---

<sup>20</sup>Dudung Abdurrahman, *Metode Penulisan Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 58.

kesahihan dari sumber-sumber yang telah didapat. Sumber-sumber primer seperti yang telah disebutkan diatas telah diteliti dan isinya sesuai dengan pembahasan yaitu Gus Dur serta proses diambilnya keputusan Muktamar NU yang ke 27 tahun 1984 di Situbondo Jawa Timur.

### **3. Interpretasi**

Interpretasi atau penafsiran terhadap sumber atau data sejarah seringkali disebut dengan analisis sejarah. Dalam hal ini data yang terkumpul dibandingkan kemudian disimpulkan agar bisa dibuat penafsiran terhadap data tersebut sehingga dapat diketahui hubungan kausalitas dan kesesuaian dengan masalah yang diteliti.<sup>21</sup> Dalam penulisan mengenai peran abdurrahan wahid dalam Muktamar NU yang ke-27 tahun 1984 di Situbondo Jawa Timur penulis menganalisa secara mendalam terhadap sumber-sumber yang telah diperoleh baik primer ataupun sekunder kemudian penulis menyimpulkan sumber-sumber tersebut sebagaimana dalam kajian yang diteliti.

### **4. Historiografi**

Historiografi merupakan tahap terakhir dalam metode sejarah, yakni usaha untuk merekonstruksi kejadian masa lampau dengan memaparkan secara sistematis, terperinci, utuh dan komunikatif agar dapat dipahami dengan mudah oleh para pembaca. Dalam penulisan ini menghasilkan sebuah laporan penulisan yang berjudul “Peran Abdurrahman Wahid dalam Muktamar NU ke-27 tahun 1984 di Situbondo”.

---

<sup>21</sup> Ibid, 64.

Penulis dalam hal ini akan menggunakan metode deskriptif analitik, yang berarti metode dengan cara menguraikan sekaligus menganalisis.<sup>22</sup> Dengan menggunakan kedua cara secara bersama-sama maka diharapkan objek dapat diberikan makna secara maksimal. Jadi penulis akan menguraikan data-data mengenai Muktamar dan kemudian akan menganalisis agar dapat memaparkan makna peran dari Abdurrahman Wahid dalam Muktamar NU yang ke-27 di Situbondo tahun 1984.

#### **H. Sistematika Bahasan**

Penyajian dalam penulisan ini mempunyai tiga bagian: Pengantar, Hasil Penulisan, dan Simpulan. Hal tersebut disusun untuk mempermudah pemahaman sehingga dapat menghasilkan pembahasan yang sistematis. Penulisan penulisan ini dibagi menjadi enam bab, tiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab. Pembagian ini didasarkan atas pertimbangan adanya permasalahan-permasalahan yang perlu diklasifikasikan dalam bagian-bagian yang berbeda.

Adapun sistematika pembahasan secara terperinci yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

**BAB I :** Dalam bab ini dipaparkan tentang pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, pendekatan dan kerangka teori, penulisan terdahulu, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

---

<sup>22</sup>Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penulisan Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 336.

- BAB II : Pada bab kedua ini dipaparkan pokok bahasan mengenai Muktamar NU yang ke 27 tahun 1984 di Situbondo Jawa Timur.
- BAB III : Pada bab ini difokuskan pada penjelasan mengenai biografi Abdurahman Wahid.
- BAB IV : Pada bab ini difokuskan pada analisis kritis penulis terhadap peran apa saja yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid dalam Muktamar NU ke-27 di Situbondo tahun 1984.
- BAB V : Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan hasil penulisan serta saran- saran dan penutup.